



Sekuritisasi Isu Separatisme Patani, Thailand Selatan dalam Perspektif Konstruktivisme

Cintya Wulandari

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The escalation in insurgency by Southern Thailand separatist groups that began with the Arion military raid, the Krue-se and Tak Bai incidents in 2004, prompted the Thai government to take securitization action against an ethnonational nationalist issue that had not previously been considered a political issue. This research aimed an explanation of the securitization process undertaken by the Thai government to construct the ethnonationalist issue of Southern Thailand as a threat to Thailand's national security. This research uses the securitization theory which is focus in speech act. Speech act is the process of securitization where policy makers (stakeholders) gave an official statement to change the public's opinion on the issue. This research uses qualitative method through library literature data. The results of this study found that the process of securitization of ethnonationalist issues in South Thailand originated from a non-political issue that became a political issue after being constructed by Thai government officials statements by speech act such as "legal action should be taken" and "we mean business" aimed to construct to the Thai community the ethno-nationalist issue of Southern Thailand poses a threat to Thailand's national security.

Keywords: *Sothern Thailand separatist, securitization, threat, speech act, national security*

Pendahuluan

Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah (Kapur, 1998: 45), yang merupakan *buffer zone* dari perebutan wilayah Asia Tenggara antara Inggris dan Prancis (Ganesan & Amer, 2010:201). Meskipun demikian, negara ini tidak luput dari permasalahan konflik dalam wilayahnya. Konflik yang terjadi adalah konflik antara pemerintah Thailand dengan kaum minoritas yaitu etnis Muslim Melayu. Jika melihat dari perspektif historis, wilayah Patani di Thailand Selatan sebelumnya merupakan kerajaan Melayu Islam sebelum diambil alih oleh kerajaan Thai pada tahun 1902.

Pada tahun 1938, Phibun Songkhram, seorang Jenderal Militer melakukan kebijakan *rathniyom* (revolusi budaya) yang bertujuan menciptakan suatu identitas budaya Thai yang maju dan kebijakan "mensiamkam" orang-orang bukan Thai (*siamization policy*) (Yazid, 2013:3). Revolusi budaya ini menjadi cikal bakal adanya ketimpangan kuat dalam hal ekonomi, sosial dan politik yang berakibat pada munculnya gerakan separatis yang ingin memperoleh otonomi khusus atau ingin memerdekakan diri. Konflik yang terjadi telah berlangsung sejak awal tahun 1970-an dan hingga kini masih belum menemukan titik temu terjadi karena etnis Muslim Melayu menuntut akan

kemerdekaan dan berusaha melepaskan diri dari wilayah dan pemerintahan Thailand (Melvin, 2007:2).

Konflik Patani mencapai puncaknya pada April 2004, ditandai dengan penyerbuan terhadap markas militer Distrik Arion di Narathiwat yang menewaskan empat tentara Thailand dan hilangnya 400 senapan lengkap beserta amunisinya, diikuti dengan ratusan militan melakukan serangan teroris terhadap lebih dari 10 pos polisi di seluruh provinsi Yala, Patani, Narathiwat dan Songkhla di Thailand Selatan. Setelah 7 jam penyerangan, 32 militan mundur ke Mesjid Kru-Se yang dianggap oleh penduduk Muslim sebagai Mesjid tersuci di Patani (Cargo, 2014). Pergerakan ini dianggap sebagai titik kelemahan militan muslim sehingga Jenderal Paloo Pinmanee yang saat itu bertugas sebagai komandan memerintahkan untuk menyerang masjid berikut militan yang bersembunyi di dalamnya. Penyerangan terhadap rumah ibadah ini mendapat kecaman dari masyarakat dan juga meningkatkan intensitas konflik. Pada Oktober 2004, 1.500 demonstran berkumpul di kantor polisi Tak Bai untuk menuntut pembebasan enam orang anggota mereka yang terlibat pemberontakan Krue-Se. Namun, 1.300 demonstran ditahan di tempat demonstrasi lalu dipaksa ditumpuk dalam truk kepolisian menuju *Inkayut Army Camp*, 78 demonstrasi tewas sesak napas dan cedera serius.

Di saat terjadinya peningkatan konflik pada tahun 2004, pemerintah Thailand mulai menyadari bahwa konflik Patani di tersebut dapat meluas ke gerakan separatis dan terancamnya asas Thailand Lak Thai (Raja, Thai, Budha). Setelah terjadinya insiden Arion, Krue Se dan Tak Bai, pemerintah Thailand mulai berfokus dalam mengatasi pemberontakan tersebut dan merubah isu pemberontakan tersebut menjadi isu politik.

Sekuritisasi konflik separatis Thailand Selatan sebenarnya telah dilakukan pemerintah Thailand sejak tahun 1998, yaitu dengan melakukan diplomasi awal dengan pemberontak dengan Malaysia sebagai mediator. Upaya diplomasi tersebut dilakukan karena pada tahun 1997 pada saat pertama kalinya kelompok pemberontak melakukan operasi militer secara besar-besaran yang dikenal dengan operasi daun gugur (*Falling Leaves Operation*) di wilayah Patani. Namun, pemberontakan tersebut hanya dianggap oleh pemberontakan kecil dari sekelompok gerilyawan oleh pemerintah Thailand dan tidak mengakibatkan kerugian material yang signifikan, sehingga belum dianggap sebagai isu politis oleh pemerintah Thailand. Selain itu, upaya politik diplomasi tersebut hanya dianggap sebagai angin lalu oleh kedua belah pihak karena diplomasi yang dilakukan tidak secara mengikat, dan tidak ada sanksi yang jelas apabila kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut.

Permasalahan penelitian adalah bagaimana proses sekuritisasi konflik separatis Thailand Selatan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk mengkonstruksikan isu separatis Thailand Selatan sebagai ancaman keamanan nasional Thailand. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi yang berfokus pada *speech act*. *Speech act* adalah proses sekuritisasi dimana pengambil kebijakan (*stakeholder*) mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengubah cara pandang publik terhadap isu tersebut.

Suatu isu dapat dikatakan sebagai ancaman ketika negara melakukan tindakan wacana yang menyatakan isu tersebut merupakan ancaman, serta terdapat aktor lain (masyarakat) yang menyetujui hal tersebut. Agar sekuritisasi berhasil, aktor harus membuat argumen atau *speech act* yang harus diterima oleh audiens yang ditargetkan. Hal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan darurat yang diperlukan untuk mencegah atau mengatasi masalah tersebut (James, 2007: 302-325). Dalam *speech act* keberhasilan suatu aktor dalam menunjukkan suatu isu menjadi sebuah ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam mewacanakan keamanan. Terkait dengan hal ini

Buzan berpendapat bahwa negara merupakan aktor dalam proses sekuritisasi (Buzan & Hansen, 2008 : 213). Selain itu, konstruktivis lebih berfokus pada pemahaman proses konstruksi di balik produksi ancaman, bukan hanya menilai seberapa mengancam suatu realita objektif.

Pembahasan

Latar Belakang Konflik Separatis Thailand Selatan

Pada awalnya wilayah Thailand Selatan seperti Narathiwat, Patani dan Yala merupakan bagian dari kerajaan Melayu Patani. Namun, pada 1902 pada masa kemunduran kerajaan Melayu Patani disepakati traktat Anglo-Siam antara pemerintah Siam dan Inggris, yang berisikan bahwa wilayah Patani Raya bukan merupakan kerajaan tersendiri lagi, tapi menjadi wilayah kerajaan Siam. Saat diperintah oleh Perdana Menteri Phibun Songgram (1938-1944) upaya integrasi wilayah nasional kerajaan di implementasikan melalui sistem politik ultra-nasionalis. Penggabungan politik ini dilakukan melalui kebijakan konsolidasi wilayah bangsa Melayu untuk kepentingan integrasi (Yuniarto, 2005:6).

Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah konsolidasi administrasi yang dirancang untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah bangsa Melayu ke dalam sistem politik nasional Kerajaan Siam yang dipusatkan di Bangkok. Selain menerapkan kebijakan pemerintahan sentralistik, pihak kerajaan Siam menerapkan identitas nasional dengan semboyan trinitas (*eta lak thai*) yang hanya mengakui satu kebangsaan bangsa Thai, satu agama Buddha, dan tunduk para kekuasaan Raja. Dilihat dari dimensi sosial budaya, identitas semacam ini dapat dilihat sebagai bentuk pemaksaan ideologi yang dapat mencabut masyarakat Muslim Patani dari tradisi dan identitasnya. Karena diluar tiga unsur tersebut kemudian tidak dianggap signifikan dalam urusan campur tangan kekuasaan maupun dalam penentuan kebijakan negara. Etnis Patani yang tidak menginginkan adanya pencampuran kultur Budha dan Islam, menyebabkan munculnya keinginan untuk mendirikan Patani Raya (Lubis, 2002:3).

Gerakan perlawanan yang muncul dipahami sebagai salah satu upaya mempertahankan identitas nilai keagamaan dan etnisitas mereka dengan menuntut diberhentikannya sikap diskriminatif kerajaan Thai. Identitas lama yang masih berada dalam bayangan kejayaan Patani mulai menunjukkan perubahan dengan diajukannya hak-hak otonomi mereka dalam masyarakat berbangsa yang lebih besar. Penyebabnya karena Patani dianggap sebagai minoritas dan daerah taklukan kerajaan Siam, untuk itu masyarakat Patani tetap berupaya mempertahankan hak-hak otonomi dan identitas sosial mereka sebagai masyarakat dengan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh sebagian besar masyarakat (Pathan, 2010:5).

Adapun faktor-faktor penyebab gerakan separatis di Thailand Selatan dapat dibedakan menjadi faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi. Secara sosial, terancamnya otonomi budaya etnik Melayu-Muslim sejak terbentuknya sistem administrasi provinsi dan terpusat, diterapkannya asimilasi serta sekularisasi sekuler menyebabkan adanya penyatuan simbol-simbol kultural dengan diberlakukannya sistem pendidikan sekuler. Pemerintah pusat mewajibkan bahasa pengantar di sekolah-sekolah menggunakan bahasa Thai dan pelarangan bahasa Melayu (Sihbudi, 2000:15). Faktor inilah yang menjadi ciri utama sekaligus dasar perjuangan bagi pemisahan diri kaum Melayu-Muslim di Thailand Selatan. Secara politik, adanya keinginan untuk mendapatkan hak otonomi dalam berbagai bidang selain dalam keagamaan, juga dalam hal kebudayaan, hukum, dan membentuk pemerintahan yang otonom, dengan adanya dominasi elit politik di pemerintahan publik dan banyaknya pegawai yang berasal dari pusat mendiskriminasikan penduduk setempat yang mayoritas Melayu Muslim (Jitpiomsri,

2006:102). Dalam hal ekonomi, tiga wilayah di Thailand Selatan yaitu Narathiwat, Yala dan Pattani merupakan provinsi termiskin di Thailand dengan 46% populasi berada di bawah garis kemiskinan.

Dinamika Konflik Separatis Thailand Selatan

Konflik separatis Patani mencapai puncaknya pada April 2004, ditandai dengan kelompok pemberontak yang melakukan penyerbuan terhadap markas militer Thailand di Distrik Arion Narathiwat. Serangan yang difokuskan untuk fasilitas militer ini menewaskan empat tentara Thailand dan hilangnya 400 senapan lengkap beserta amunisinya. Aksi ini dilanjutkan dengan serangan teroris terhadap lebih dari 10 pos polisi di seluruh provinsi Yala, Patani, Narathiwat dan Songkhla di Thailand Selatan. Setelah berhasil melakukan penyerangan, puluhan militan mundur ke Mesjid Kru-Se yang dianggap oleh penduduk Muslim sebagai Mesjid tersuci di Patani (Cargo, 2014:42). Pergerakan ini dianggap sebagai titik kelemahan militan muslim sehingga militer Thailand diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan fisik dan penggunaan senjata tajam untuk menangkap kelompok separatis yang berkumpul di Mesjid Krue-Se. Kewenangan itu diberikan langsung oleh Wakil Perdana Menteri Thailand Chavalit Yongchaiyudh. Jenderal Paloop Pinmanee yang saat itu bertugas sebagai komandan memerintahkan untuk menyerang masjid berikut militan yang bersembunyi di dalamnya. Penyerangan terhadap rumah ibadah ini mendapat kecaman dari masyarakat dan juga meningkatkan intensitas konflik.

Pada Oktober 2004, 1.500 demonstran berkumpul di kantor polisi Tak Bai Narathiwat. Aksi demonstrasi yang dilakukan ini bertujuan untuk menunjukkan aksi protes mereka terhadap kebijakan darurat militer yang diberlakukan oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan, dan juga menuntut pembebasan enam orang anggota mereka yang terlibat pemberontakan Krue-Se. Setelah berlangsung selama beberapa jam, aksi demonstran ini menjadi tidak terkendali. Demonstran berusaha menerobos barikade penjagaan polisi, aksi saling dorong antara petugas keamanan dan demonstran berlangsung ricuh. Karena situasi yang semakin kacau, militer Thailand mulai memberikan tembakan peringatan ke udara, dan kemudian melakukan tembakan langsung ke arah demonstran dengan menggunakan peluru tajam. Insiden penembakan memakan tujuh korban jiwa, sementara 1300 demonstran lain yang ditangkap dipaksa ditumpuk dalam truk kepolisian menuju *Inkayut Army Camp*, 78 demonstrasi tewas sesak napas dan cedera serius (Nurakkate, 2012:9).

Respon Internasional Terhadap Konflik Separatis Thailand Selatan

Insiden kekerasan pada tahun 2004 tersebut menarik respon dunia internasional untuk membantu menyelesaikan konflik. Salah satunya adalah Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebagai salah satu organisasi internasional yang berfokus pada hak asasi manusia kelompok minoritas. Pada tahun 2005, OKI berkunjung ke Thailand Selatan untuk meninjau secara langsung kondisi yang dialami oleh masyarakat Muslim Melayu di wilayah Selatan. Sesuai dengan kerangka kerja yang dimiliki oleh OKI untuk melakukan resolusi konflik, tim delegasi OKI memulainya dengan pengumpulan fakta-fakta. Dari data yang mereka temukan, tim delegasi menyimpulkan bahwa kerusuhan di Thailand bukanlah berakar dari diskriminasi agama. Namun, kerusuhan berakar pada pengabaian budaya wilayah selatan. Hal ini yang sebenarnya memicu konflik hingga terjadi sampai saat ini (OKI Press Release, 2006). Setelah melakukan pengumpulan fakta dan mendengarkan argumen dari pemerintah Thailand dan perwakilan kelompok separatis, pada 23 Mei 2009 di Damaskus, OKI mengeluarkan rekomendasi yang intinya mengundang negara-negara anggota yang memiliki hubungan kuat dengan Thailand untuk membantu negara tersebut

mengimplementasikan secara penuh kesepakatan yang telah terbentuk yang akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan perdamaian di Thailand Selatan, dalam hal ini adalah Malaysia yang kedepannya akan menjadi mediator dan fasilitator dalam negosiasi antara pemerintah Thailand dan perwakilan kelompok separatis (Pattani Post, 2009).

Kebijakan Militer Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Konflik Separatis

Keseriusan pemerintah Thailand untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Thailand Selatan ini terlihat dari pemberlakuan undang-undang darurat militer di wilayah Thailand Selatan pada tahun 2004 dan 2005. Kebijakan darurat militer yang dilakukan dilegitimasi Pasal 12 *Emergency Degree* yang memberikan kewenangan penuh kepada Perdana Menteri untuk menyatakan keadaan darurat di suatu wilayah maupun seluruh wilayah di Thailand, dan juga menyatakan pemerintah Thailand memiliki kewenangan untuk menahan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan di tempat manapun yang telah ditentukan pemerintah. Kebijakan darurat militer yang dilakukan bertujuan untuk membatasi gerak kelompok separatis.

Namun, kebijakan darurat militer ini justru memperparah keadaan, aksi teror gerakan separatis semakin meningkat. Sehingga, Perdana Menteri Surayud mengeluarkan kebijakan untuk membentuk kembali SBPAC (Southern Border Province Administration Center). SBPAC merupakan badan yang khusus dibentuk untuk menangani permasalahan yang terjadi di Thailand Selatan. SBPAC bertugas menjadi jembatan antara pemerintah lokal dengan etnis Melayu-Muslim di Thailand Selatan dan juga menjadi penampung keluhan dan aspirasi yang berhubungan dengan kondisi politik di Thailand Selatan (Mc Cargo, 2007:41). Namun, kebijakan ini tidak efektif karena kurang memperhatikan keselamatan atau melindungi hak-hak dasar penduduk sipil.

Kebijakan Politik Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Konflik Separatis

Setelah OKI membantu menyelesaikan konflik pada tahun 2009, pemerintah Malaysia telah mengambil alih sebagai mediator dalam menengahi proses perundingan antara pemerintah Thailand dan organisasi separatis Thailand Selatan. Proses perundingan ini didukung oleh Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dan Menteri Luar Negeri Malaysia Najib Razak yang mengambil bagian dalam penandatanganan dokumen konsensus umum pada 28 Februari 2013 di Kuala Lumpur (Antara, 2013). *Kuala Lumpur Dialogue Process* menghasilkan kesepakatan gencatan senjata yang dikenal dengan *Ramadhan Initiative*. Namun, proses negosiasi tersebut tidak berhasil secara keseluruhan karena pertama, tuntutan dari pihak BRN yaitu pengakuan hak-hak dan kedaulatan Melayu Patani tidak dituruti oleh pihak pemerintah Thailand. Kedua, adanya ketidakpercayaan terhadap pihak yang dikirim untuk berunding dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat baik dari kelompok pemberontak ataupun pemerintah Thailand.

Kebijakan Ekonomi Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Konflik Separatis

Selain menjadi mediator dan fasilitator dalam perundingan, Malaysia dan Thailand juga sepakat untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan naskah tiga E, yakni pendidikan (*education*), pekerjaan (*employment*), dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) (Funston, 2010:248). Kedua negara juga sepakat untuk memilih pembangunan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di kawasan terpencil dan berpenghasilan rendah di Thailand, khususnya di wilayah Thailand Selatan. Salah satu faktor penyebab meningkatnya gerakan separatis adalah angka kemiskinan yang tinggi, hal ini merupakan elemen penting dari strategis jangka panjang untuk mengurangi masalah separatis di Thailand Selatan. Namun, implementasi di lapangan kebijakan pemberantasan

kemiskinan seperti pelatihan magang dan kewirausahaan tidak dilakukan dengan efektif. Hingga saat ini, 46% populasi di Thailand Selatan masih berada dibawah garis kemiskinan.

Analisis Sekuritisasi Konflik Separatis Patani Thailand Selatan

Sekuritisasi merupakan suatu proses dimana adanya perubahan dari isu publik yang semula berada pada isu non politik (negara tidak menaruh perhatian penuh pada isu tersebut) hingga menjadi isu politik (isu yang dianggap sebagai ancaman esensial, sehingga membutuhkan keadaan darurat). Perubahan eskalasi yang dilakukan aktor untuk merubah isu non-politik menjadi isu politik dilakukan melalui proses sekuritisasi. Dalam argumen Buzan, negara merupakan aktor utama dan berhak melakukan proses sekuritisasi untuk melakukan tindakan terhadap suatu ancaman. Dalam permasalahan konflik separatis Thailand Selatan, pemerintah Thailand sebagai aktor sekuritisasi telah mempresentasikan bahwa isu separatis Thailand Selatan merupakan isu yang bisa mengancam keamanan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari *speech act* yang dilakukan pemerintah Thailand dalam pernyataan resmi oleh pemangku jabatan.

Setelah tiga insiden besar pada tahun 2004, Pemerintah Thailand menyatakan bahwa "*Insurgency as a local front in the global war of terrorism*". Pernyataan dari pemerintah Thailand mengadung makna bahwa pemberontakan di Thailand Selatan merupakan serangan teror, yang dilakukan sebagai bentuk *self-defense* atas aksi-aksi kekerasan yang terjadi di masyarakat. Diikuti dengan kebijakan darurat militer karena situasi sudah dianggap memburuk. Pada tahun 2007, kembali terjadi serangan seretak dengan 38 serangan bom, pembakaran dan penghancuran yang menargetkan tempat komersial yang dimiliki oleh etnis Budha dan Tionghoa. Setelah penyerangan tersebut pemerintah Thailand kembali mengeluarkan pernyataan "*attack was part of an attempt to politically destabilise the region in an effort to establish a "pure islamic state" where all citizens in the deep south would be muslim*" dan juga "*Legal action must also be taken against the wrongdoers to show we mean business*."

Pernyataan di atas terdapat *diskourse* atau wacana yang dikonstruksikan melalui pernyataan resmi dari pemerintah Thailand. Pemerintah Thailand mendefinisikan gerakan di Thailand Selatan tersebut sebagai aksi teror, tetapi juga sebagai gerakan separatis. Karena penyerangan yang dilakukan merupakan upaya politik untuk mendirikan negara islam murni dimana semua warga negara harus seorang muslim. Dalam pernyataan tersebut pemerintah Thailand berusaha menjelaskan bahwa pemberontakan di Thailand Selatan sudah menjadi salah satu prioritas keamanan nasional, karena dapat mengancam kesatuan dan integritas negara. Dengan menyebutkan kata-kata "*legal actions*" dan "*we mean business*" pemerintah Thailand berusaha memperlihatkan bahwa ancaman sudah menjadi perkara yang serius dan untuk mengatasi keresahan yang ditimbulkan oleh pemberontakan tersebut, pemerintah telah menginstruksikan untuk mengambil langkah legal.

Speech act yang dilakukan pemerintah Thailand tersebut menjadikan perubahan opini publik dari masyarakat Thailand yang awalnya hanya menganggap konflik separatis hanya konflik kecil yang berdampak pada wilayah Thailand Selatan saja hingga respon masyarakat yang berpendapat bahwa separatis merupakan salah satu dari masalah serius di Thailand. Perubahan opini publik tersebut terlihat dari perbedaan hasil penelitian dari tahun 2003 sebelum proses *speech act* dan penelitian pada tahun 2008 setelah proses *speech act*.

Kesimpulan

Proses sekuritisasi sebuah isu sangat bergantung pada persepsi ancaman yang diberikan yang diberikan aktor terkait dalam suatu masalah/isu, dalam hal ini adalah

bagaimana bahasa mendefinisikan konstruksi sebuah ancaman. Proses sekuritisasi yang pemerintah Thailand lakukan melalui *speech act* berawal dari realita objektif (peristiwa yang terjadi) yang belum menjadi isu politik, lalu peristiwa tersebut menjadi isu politik yang dikonstruksikan oleh pemerintah Thailand sebagai aktor sekuritisasi dengan pernyataan-pernyataan resmi untuk mengkonstruksikan kepada masyarakat Thailand bahwa pemberontakan di Thailand Selatan termasuk ke pemberontakan separatis yang menjadi ancaman keamanan nasional Thailand. Hal tersebut terlihat dari penekanan pernyataan "*Legal actions*" dan "*we mean business*". *Speech act* yang dilakukan pemerintah Thailand tersebut menjadikan perubahan opini publik dari masyarakat Thailand yang awalnya hanya menganggap konflik separatis hanya konflik kecil yang berdampak pada wilayah Thailand Selatan saja hingga respon masyarakat yang berpendapat bahwa separatis merupakan salah satu dari masalah serius di Thailand. Perubahan opini publik tersebut terlihat dari perbedaan hasil penelitian dari tahun 2003 sebelum proses *speech act* dan penelitian pada tahun 2008 setelah proses *speech act*.

Referensi

- Abuza, Zacharya. (2011). "The Ongoing Insurgency in Southern Thailand : Trends in Violence, Countereinsurgency Operations, and the Impact of National Politics". *Institute for National Strategic Studies Strategic Perspective*. Vol.6 : 12
- Barry Buzan, Lene Hanzen. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. 1st. New York : Cambridge University Press
- Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde. (1998). *Security : A New Framework for Analysis*. London: Rienner Publisher
- Buzan, Barry. (2008). *People, State and Fear*. London: LCPR Press
- David K. Wyatt. 1967. "A Thai Version of Newbold's 'Hikayat Patani'." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* . Vol 40 (2) : 16-37
- Funston, John. (2010). Malaysia and Thailand's Southern Conflict: Reconciling Security and Ethnicity. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 32 (2)
- Jitpiromsri, Srisompob. (2014). "An Inconvenient Truth About the Deep South Violent Conflict : A Decade of Chaotic, Constrained Realities and Uncertain Resolution." *Center For Conflict Studies and Cultural Diversity*
- Jitpiromsri, Srisompob. (2011). "Sixth Year of the Southern Fire : Dynamics of Insurgency and Formation of the New Imagined Violence." *Center for Conflict Studies and Cultural Diversity*
- Jitpiromsri, Panyasak Sobhonvasu. (2006). "Unpacking Thailand's Southern Conflict ; The Poverty of Structural Explanations." *Critical Asian Studies*. Vol 28 (1): 102.
- Jones, Sara. (2007). "Framing The Violence in Southern Thailand: Three Waves of Malay Muslim Separatism". Center For International Studies Ohio University
- Lacina, Bethany. (2014). "Public Opinion and the Cost of Civil War : Evidence form the Southern Thailand Insurgency". *Rochester University Journal*. Vol 1
- Mc Cargo, Duncan. (2007). *Rethinking Thailand's Southern Violence*. NUS Press : Singapore
- Melvin, Neil. (2007). "Conflict in Southern Thailand : Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency." *SIPRI. dan Rohingya*. Jakarta: LIPI
- Onuf, Nicholas. (1989). *World of Our Making*. London : Routledge
- Rosyidin, Mohammad. (2015). *The Power of Ideas*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Searle, John. (1969). *Speech Acts an Essay in the Philosophy of Language*. 1st. Cambridge: Cambridge University Press

Suhrke, Astri. (1975). "Irredentism Contained; The Thai-Muslim Case." *Comparative Politics* : 199

Yuniarto, Paulus Rudolf. (2005). "Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, dan Akar Gerakan Separatisme". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol VII (1)

Website

Antara News. (2013). Malaysia Tuan Rumah Perundingan Perdamaian Thailand. <http://www.antaraneews.com/berita/360928/malaysia-tuan-rumah-perundingan-perdamaian-thailand> (diakses pada 11 24 2016)

Bangkok, Pundit. (2007). Economic Situation in Southern Thailand, <https://asiancorrespondent.com> (diakses pada 04 15 , 2016)

Human Right Watch. (2007). Insurgent Attacks on Civilians in Thailand's Southern Border Province. <https://www.hrw.org> (diakses pada 04 20, 2016)

Pundit, Bangkok. (2007). The Bangkok Post on the Violence in Southern Thailand. <https://asiancorrespondent.com/2007/03/the-bangkok-post-on-the-violence-in-southern-thailand> (diakses pada 10 20, 2016)

Tempo. (2007). Thailand Malaysia Petakan Aksi Ketegangan di Thailand Selatan. <http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2007/03/23/brk,2007032396136,id.html> (diakses pada 10 25 2016)

Thailand dan Malaysia Bekerja Sama. (2010). <http://internasional.kompas.com/read/2010/08/05/17014936/Thailand.dan.Malaysia.Bekerja.Sama> (diakses pada 11 24 2016)